

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019



Jl. Lintas Malindo, No. 22-23, Entikong, Sanggau , Kalimantan Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kalimantan Barat, 31 Desember 2019
Kepala,,

Drh. Yongki Wahyu Setiawan
NIP. 198103302008011004

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.4. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.2. Aset Lain-lain

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kalimantan Barat, 31 Desember 2019
Kepala,,

Drh. Yongki Wahyu Setiawan
NIP. 198103302008011004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp528,533,100.00 atau mencapai 132.13% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp400,000,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp8,257,390,821.00 atau mencapai 99.41% dari alokasi anggaran sebesar Rp8,306,654,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp16,549,146,277.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp224,310,456.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp15,955,934,035.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp368,901,786.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp-3,121,206.00 dan Rp16,552,267,483.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp528,645,702.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6,640,576,491.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-6,111,930,789.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-3,865,956.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-6,115,796,745.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp15,281,450,007.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-6,115,796,745.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7,386,614,221.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp16,552,267,483.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	400,000,000.00	528,533,100.00	132.13	286,182,958.00
Jumlah Pendapatan		400,000,000.00	528,533,100.00	132.13	286,182,958.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	2,455,239,000.00	2,442,386,281.00	99.48	2,134,445,348.00
Belanja Barang	B.4.	3,273,875,000.00	3,249,259,640.00	99.25	2,144,722,156.00
Belanja Modal	B.5.	2,577,540,000.00	2,565,744,900.00	99.54	4,587,805,000.00
Jumlah Belanja		8,306,654,000.00	8,257,390,821.00	99.41	8,866,972,504.00

II. NERACA

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0.00	0.00
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	112,602.00	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.3.	-563.00	0.00
Persediaan	C.1.4.	223,881,623.00	164,010,126.00
Jumlah Aset Lancar		224,310,456.00	164,326,920.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	3,619,590,850.00	3,145,443,950.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	7,247,863,811.00	6,237,299,411.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	9,774,843,025.00	9,219,910,425.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	692,147,000.00	652,197,000.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	119,261,900.00	119,261,900.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-5,497,772,551.00	-4,609,711,198.00
Jumlah Aset Tetap		15,955,934,035.00	14,764,401,488.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	44,975,000.00	44,975,000.00
Aset Lain-lain	C.3.2.	783,585,000.00	657,085,000.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-459,658,214.00	-349,021,607.00
Jumlah Aset Lainnya		368,901,786.00	353,038,393.00
Jumlah Aset		16,549,146,277.00	15,281,766,801.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	-3,438,000.00	0.00
Uang Muka dari KPPN	C.4.2.	316,794.00	316,794.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-3,121,206.00	316,794.00
Jumlah Kewajiban		-3,121,206.00	316,794.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	16,552,267,483.00	15,281,450,007.00
Jumlah Ekuitas		16,552,267,483.00	15,281,450,007.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		16,549,146,277.00	15,281,766,801.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	528,645,702.00	282,797,958.00
JUMLAH PENDAPATAN		528,645,702.00	282,797,958.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2,442,386,281.00	2,134,445,348.00
Beban Persediaan	D.3.	184,120,047.00	206,585,200.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1,277,731,400.00	841,860,961.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	444,211,800.00	271,040,700.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1,293,428,440.00	864,504,550.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	998,697,960.00	776,721,159.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	563.00	0.00
JUMLAH BEBAN		6,640,576,491.00	5,095,157,918.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-6,111,930,789.00	-4,812,359,960.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	2,910,000.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	260,903,974.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	108,902.00	590,250.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	3,974,858.00	1,882,194.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-3,865,956.00	-259,285,918.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-6,115,796,745.00	-5,071,645,878.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I ENTIKONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	15,281,450,007.00	12,454,483,654.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-6,115,796,745.00	-5,071,645,878.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0.00	-942,633,627.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0.00	-942,633,627.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	7,386,614,221.00	8,841,245,858.00
EKUITAS AKHIR	E.5.	16,552,267,483.00	15,281,450,007.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. **Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong** ***Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong***

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong merupakan Renstra yang disusun berdasar Rencana Strategis (Restra) Badan Karantina Pertanian tahun 2010-2014. Pada dasarnya Renstra merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan perkarantinaan di UPT serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani nabati serta pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur karantina dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati khususnya di UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong yang selaras dengan arah kebijakan strategis Departemen Pertanian , maka Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong menetapkan rencana strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong 2010-2014 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan operasional , program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan operasional pada 2010-2014.

2.1. VISI dan MISI

Visi

“ Tangguh dan Terpercaya’

dalam melindungi Kelestarian Sumberdaya Alam

Hayati Hewan, Tumbuhan, Lingkungan dan Keaneragaman Hayati

serta Keamanan Pangan di Perbatasan Kalbar Indonesia – Sarawak Malaysia”.

Tangguh : Penyelenggaraan Karantina Pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya : Keberhasilan Barantan berkaian dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun diluar negeri, oleh karena itu setiap kebijakan dan tindakan Barantan perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati.

Misi

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan misi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong yang menggambarkan ruang lingkup dan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- Memberikan kontribusi nyata dalam upaya perlindungan dan penyelamatan sumberdaya alam hayati hewani dan nabati Negara Kesatuan RI khususnya Propinsi Kalimantan Barat dari serangan hama penyakit hewan karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) .
- Mendukung keberhasilan program agribisnis dan ketahanan pangan nasional serta memfasilitasi kelancaran perdagangan / pemasaran produk pertanian.
- Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik.

- Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina pertanian.

Nilai – Nilai

Nilai – nilai yang ditanamkan dalam organisasi agar membudaya dalam keseharian organisasi. Falsafah tidaklah berdiri sendiri melainkan diturunkan dari Visi dan Misi serta tujuan agar nilai – nilai yang dibudayakan akan menjadi perilaku setiap individu dalam organisasi agar tidak menyimpang dari visi dan misi.

Nilai- nilai yang dibudayakan di lingkungan Organisasi Barantan yaitu :

- **Berfikir strategis** untuk mencapai tujuan : selalu berupaya melakukan pilihan terbaik dalam mencapai tujuan.
- Berlaku **amanah** dalam mengemban tugas, mengandung arti profesional yaitu selalu mengembangkan kemampuan secara terus menerus dalam bidang tugasnya, dan bertanggungjawab yaitu menggunakan sumberdaya dengan efektif dan efisien.
- **Inovatif**, senantiasa kreatif dalam mengembangkan cara-cara terbaik dalam mencapai tujuan.
- **Bekerjasama dan komunikatif** , untuk memahami kebutuhan stakeholder dan bekerja baik internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan.
- **Science Base** dalam pengertian bahwa karantina adalah pengelolaan resiko, sehingga selalu mempertimbangkan aspek teknologi dan ilmu pengetahuan dalam memutuskan suatu kebijakan.
- **Berdedikasi** dalam pelayanan, dalam arti berusaha memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.2.1. Tujuan

- a. menyusun rencana kerja, evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan perkarantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pemebebasan media pembawa hama penyekit hewan karantina (HPHK) dan norganisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. melaksanakan pemantauan daerah sebar HPHK DAN optk;
- d. melaksanakan pembuatann koleksi HPHK dan OPTK;
- e. melakasanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. melaksanakan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. melaksanakan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. mengelola sistem informasi , dokumentasi, dan sarana teknis karantina hewan dan tumbuhan.
- i. melaksanakan pengawasann dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan kemanan hayati hewani dan nabti.
- j. melakasanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.2.2. Sasaran

- a. Tersusunnya rencana kerja , evaluasi dan pelaporan;
- b. Terlaksananya perkarantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pemebebasan media

pembawa hama pennyakit hewan karantina (HPHK) dan norganisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);

- c. Terlaksananya pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Terlaksananya pembuatann koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Terlaksananya pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Terlaksananya pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Terlaksananya pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Terlaksananya pengelolaan sistem informasi , dokumentasi, dan sarana teknis karantina hewan dan tumbuhan.
- i. Terlaksananya pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan kemanan hayati hewani dan nabti.
- j. Terlaksananya urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.3. Analisa Lingkungan Strategis

Perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan pesat akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan perkarantinaaan pertanian. Pengaruh lingkungan tersebut berhubungan dengan kondisi internal Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong dan pengaruh lingkungan di luar (eksternal) sebagai tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat diambil dalam menyusun rencana strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong.

a). Faktor Internal

Kekuatan :

- 1). Adanya landasan hukum berupa UU No. 16 tahun 1992 yang menjadi dasar kewenangan penyelenggaraan perkarantinaan.
- 2). Telaj memiliki SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan hewan dan tumbuhan, dengan tersedianya pejabat fungsional karantina hewan (PMV.MV) dan karantina tumbuhan (POPT); PPNS dan tenaga intelejen karantina hewan dan tumbuhan.
- 3). Telah memiliki kelembagaan UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong dan berbagai peraturan perundangan yang menjadi kewenangan, serta tersedianya juklak dan juknis dari Pusat untuk penyelenggaraan karantina pertanian.
- 4). Telah tersedianya sistem pelaporan dengan program Sikawan dan Sipusra, SAI, dan SABMN.
- 5). Telah tersedia sarana dan prsarana sebagai pendukung kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong.
- 6). Merupakan salah satu unsur anggota CIQ (Custom, immigration, Quarantine) yang merupakan instansi teknis yang harus ada di pintu pemasukan dan pengeluaran antar negara.
- 7). Sebagai UPT Badan Karantina Pertanian di daerah, dimana Badan Karantina Pertanian merupakan wujud keanggotaan Indonesia dalam organisasai perdagangan dunia WTO (World Trade Organisation) ;OIE (Office International des epizooties) dan IPPC (International Plant Protection Convention) serta merupakan Sekretariat Nasional Enquiry Point untuk mendukung proteksi – promosi perdagangan.

Kelemahan :

- 1). Kuantitas dan kualitas SDM Karantina Hewan dan Tumbuhan belum memenuhi kebutuhan UPT dan seluruh Wilkernya.

- 2). Komposisi dan distribusi pejabat fungsional karantina hewan dan tumbuhan belum proporsional.
- 3) Penerimaan pegawai masih terpusat di Jakarta dan belum dapat menerima pegawai dari daerah yang mungkin lebih handal dan tahan bekerja di daerah.
- 4) Belum seluruh keperluan sarana dan prasarana yang memadai tersedia di UPT.
- 5). Belum semua peraturan dan perundangan Karantina Hewan maupun Karantina Tumbuhan dapat dilaksanakan dengan optimal mengingat karakteristik Wilayah Perbatasan yang berbeda dengan daerah lain.
- 6). Sistem koordinasi operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan dengan instansi lain di lapangan belum dapat bersinergi secara optimal.
- 7). Laboratorium Karantina Tumbuhan dan hewan belum dapat difungsikan secara optimal.
- 8). Belum optimalnya sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundangan karantina pertanian.

b). Faktor Eksternal

Peluang :

- 1). Tersedianya formasi petugas karantina hewan dan karantina Tumbuhan.
- 2). Tersedianya program pelatihan dan pendidikan bagi petugas karantina pertanian .
- 3). Peran karantina pertanian yang makin penting dalam menentukan akses pasar pada perdagangan internasional dan filter bagi masuknya OPTK dan HPHK dalam penerapan SPS Agreement.
- 4). Meningkatnya hubungan kerjasama antar instansi terkait baik nasional, regional maupun internasional melalui berbagai forum kerjasama, koordinasi dan

komunikasi, antara lain melalui forum kerjasama BIMP-EAGA (Brunei Darussalam Indonesia Malaysia dan Philippine – East Asian Growth Area), BTA (Border Trade Agreement), Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Indonesia Malaysia).

Tantangan :

- 1). Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya Clean Government dan Good gvernance.
- 2). Tuntutan atas penyelenggaraan karantina pertanian yang sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan otonomi daerah.
- 3). Diperlukannya sistem perkarantinaan Pertanian yang mampu mendorong dan meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global.
- 4). Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan prima.
- 5). Meningkatnya volume dan jenis komoditi serta frekuensi lalu-lintas media pembawa HPHK /OPTK baik Espor maupun impor.
- 6). Masih banyaknya Pintu pemasukan dan pengeluaran di perbatasan yang telah ditetapkan namun belum diresmikan oleh pemerintah dan belum dapat dijaga petugas karantina pertanian,
 - PPLB Badau Kab. Kapuas Hulu dan PPLB Aruk Kab. Sambas : Bangunan/Komplek Pemeriksaan terpadu sudah ada namun belum diresmikan oleh pemerintah.
 - PPLB Jagoi Babang dan PPLB Senaning : belum ada tempat/bangunan untuk pemeriksaan terpadu.
- 7). Terdapat kurang lebih 50-60 tempat/ jalan tikus/Jalan tembus di perbatasan yang menghubungkan kedua daerah di Kalbar dan Serawak di seluruh garis

perbatasan yang belum ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran yang sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat tradisional untuk kegiatan mengangkut keluar masuk barang antar negara.

2.4. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Badan Karantina Pertanian c.q. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong Tahun 2006-2009, ditempuh strategi dengan mengoptimalkan peran serta Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong dalam mendukung keberhasilan pembangunan sistem dan usaha agribisnis nasional khususnya di Wilayah Kalimantan Barat. Strategi tersebut dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan dan dijabarkan dalam kegiatan perkarantinaaan di UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong beserta Wilayah Kerjanya.

2.5. Kebijakan Pembangunan Perkarantinaaan

Kebijakan operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Membangun dan memperkuat kelembagaan secara terpadu
- b. Membangun sarana dan prasarana yang memenuhi standar internasional.
- c. Mengembangkan SDM Perkarantinaaan yang Profesional.
- d. Mengembangkan teknik dan Metode yang "Up to Date".
- e. Menata peraturan dan perundangan perkarantinaaan dan penegakan hukum yang kuat dan penerapan yang konsisten.
- f. Membangun kerjasama nasional dan internasional

- g. Mengembangkan sistem informasi dan public awareness
- h. Mengembangkan manajemen pelayanan Prima.

2.6. Program Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong menetapkan 6 (enam) program kerja sebagai program strategis, yaitu :

1. Pengembangan SDM
2. Penguatan Kelembagaan
3. Pengembangan Kerjasama dan Public Awareness
4. Pengembangan Peraturan dan Perundangan dan Sistem Perkarantinaan.
5. Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan sensor karantina	80,000,000.00	400,000,000.00
Jumlah Pendapatan	80,000,000.00	400,000,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,458,416,000.00	1,875,595,000.00
Belanja Lembur	499,644,000.00	579,644,000.00
Belanja Barang Operasional	719,652,000.00	719,652,000.00
Belanja Barang Non Operasional	357,159,000.00	353,159,000.00
Belanja Barang Persediaan	138,000,000.00	230,560,000.00
Belanja Jasa	336,764,000.00	226,204,000.00
Belanja Pemeliharaan	444,320,000.00	444,320,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,185,980,000.00	1,299,980,000.00
Belanja Modal Tanah	536,000,000.00	835,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	771,340,000.00	1,147,140,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,600,700,000.00	555,400,000.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	40,000,000.00
Jumlah Belanja	8,047,975,000.00	8,306,654,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 528,533,100.00 atau mencapai 132.13% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 400,000,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Denda	0.00	842,200.00	0.00
Pendapatan Jasa Lainnya	0.00	30,450,000.00	0.00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	400,000,000.00	497,240,900.00	124.31
Jumlah	400,000,000.00	528,533,100.00	132.13

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 84.68% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	2,910,000.00	- 100.00
Pendapatan Denda	842,200.00	3,229,011.00	-73.92
Pendapatan Jasa Lainnya	30,450,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	497,240,900.00	279,568,947.00	77.86
Pendapatan Lain-lain	0.00	475,000.00	- 100.00
Jumlah	528,533,100.00	286,182,958.00	84.68

Terdapat piutang PNBK pada Bend. Penerima sebesar Rp. 112.602 yang merupakan pendapatan bulan Desember 2019 yang akan di setor pada Januari 2010

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp8,257,390,821.00 atau 99.41% dari anggaran belanja sebesar Rp8,306,654,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	2,455,239,000.00	2,442,388,519.00	99.48
Belanja Barang	3,273,875,000.00	3,249,259,640.00	99.25
Belanja Modal	2,577,540,000.00	2,565,744,900.00	99.54
Total Belanja Kotor	8,306,654,000.00	8,257,393,059.00	99.41
Pengembalian Belanja		-2,238.00	0.00
Total Belanja	8,306,654,000.00	8,257,390,821.00	99.41

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -6.87% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya revisi anggaran yg menyebabkan pagu belanja 53 berkurang.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	2,442,386,281.00	2,134,445,348.00	14.43
Belanja Barang	3,249,259,640.00	2,144,722,156.00	51.50
Belanja Modal	2,565,744,900.00	4,587,805,000.00	-44.07
Total Belanja	8,257,390,821.00	8,866,972,504.00	-6.87

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,442,386,281.00 dan Rp. 2,134,445,348.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 14.43% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan CPNS sebanyak 12 orang yang berpengaruh terhadap realisasi belanja pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,862,762,519.00	1,566,175,022.00	18.94
Belanja Lembur	579,626,000.00	568,746,000.00	1.91
Jumlah Belanja Kotor	2,442,388,519.00	2,134,921,022.00	14.40
Pengembalian Belanja Pegawai	-2,238.00	-475,674.00	-99.53
Jumlah Belanja	2,442,386,281.00	2,134,445,348.00	14.43

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,249,259,640.00 dan Rp. 2,144,722,156.00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 51.50% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan kegiatan khususnya pada belanja barang operasional dan non operasional.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	718,549,500.00	496,761,850.00	44.65
Belanja Barang Non Operasional	351,351,300.00	131,705,100.00	166.77
Belanja Barang Persediaan	230,450,000.00	170,836,706.00	34.89
Belanja Jasa	211,268,600.00	209,873,250.00	0.66
Belanja Pemeliharaan	444,211,800.00	271,040,700.00	63.89
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,293,428,440.00	864,504,550.00	49.62
Jumlah Belanja Kotor	3,249,259,640.00	2,144,722,156.00	51.50
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	3,249,259,640.00	2,144,722,156.00	51.50

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2,565,744,900.00 dan Rp.4,587,805,000.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -44.07% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya revisi anggaran yang mengurair belanja 53.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	833,797,900.00	199,500,000.00	317.94
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,137,064,400.00	1,143,262,300.00	-0.54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	554,932,600.00	2,973,152,700.00	-81.34
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	39,950,000.00	226,915,000.00	-82.39
Belanja Modal Lainnya	0.00	44,975,000.00	-100.00

Jumlah Belanja Kotor	2,565,744,900.00	4,587,805,000.00	-44.07
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	2,565,744,900.00	4,587,805,000.00	-44.07

B.5.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 833,797,900.00 dan Rp. 199,500,000.00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 317.94% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya belanja modal tanah untuk pembangunan rumah jaga.

Perbandingan Belanja Modal Tanah
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	833,797,900.00	199,500,000.00	317.94
Jumlah Belanja Kotor	833,797,900.00	199,500,000.00	317.94
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	833,797,900.00	199,500,000.00	317.94

Mutasi tambah atas nilai Tanah senilai Rp833.797.900 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), berasal dari:

1. Pembelian tanah kantor induk senilai Rp. 299.000.000.
2. Pengembangan aset dari KDP tanah bangunan kantor pemerintah senilai Rp. 534.797.900

Mutasi kurang atas nilai Tanah senilai Rp359.651.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Hibah tanah bangunan laboratorium ke PUPR senilai Rp. 178.704.000.
2. Hibah tanah bangunan laboratorium ke PUPR senilai Rp. 180.947.000.

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1,137,064,400.00 dan Rp. 1,143,262,300.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar -0.54% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp1.137.064.400 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah), berasal dari:

1. Pembelian 1 Unit Station Wagon senilai Rp. 258.000.000
2. Pembelian 1 Unit Sepeda Motor senilai Rp. 36.000.000
3. Pembelian 12 Buah Meja Kerja Kayu senilai Rp. 22.500.000
4. Pembelian 46 Buah Kursi Besi/Metal senilai Rp. 61.500.000
5. Pembelian 10 Buah A.C Split senilai Rp. 74.000.000
6. Pembelian 1 Buah Vertical Blind senilai Rp. 47.000.000
7. Pembelian 5 Buah Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp. 13.680.000
8. Pembelian 5 Buah P.C Unit senilai Rp. 75.000.000
9. Pembelian 3 Buah Laptop senilai Rp. 44.700.000
10. Pembelian 8 Buah Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp. 19.790.400
11. Pembelian 1 Buah Server senilai Rp. 50.000.000
12. Pengembangan Nilai Aset 1 Unit Mini Bus senilai Rp. 29.998.000
13. Pembelian 1 Unit Sepeda Motor senilai Rp. 36.000.000
14. Pembelian 6 Unit Sepeda Motor senilai Rp. 216.000.000
15. Pembelian 1 Unit Alat Laboratorium Penunjang Lainnya senilai Rp. 6.200.000
16. Pembelian A.C Split 1 Unit senilai Rp. 5.600.000
17. Pembelian Cold Storage (Alat Pendingin) 2 Unit senilai Rp. 11.200.000
18. Pembelian Micropipette 50-200 UI 1 Unit senilai Rp. 3.500.000
19. Pembelian A.C Split 5 Unit senilai Rp. 32.500.000
20. Pembelian Vertical Blind 1 Buah senilai Rp. 11.496.000
21. Pembelian Sepeda Motor 2 Unit senilai Rp. 65.200.000
22. Pembelian Sepeda Motor 1 Unit senilai Rp. 17.200.000

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,137,064,400.00	1,143,262,300.00	-0.54
Jumlah Belanja Kotor	1,137,064,400.00	1,143,262,300.00	-0.54
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	1,137,064,400.00	1,143,262,300.00	-0.54

B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 554,932,600.00 dan Rp. 2,973,152,700.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -81.34% dibandingkan TA 2018.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	554,932,600.00	2,973,152,700.00	-81.34
Jumlah Belanja Kotor	554,932,600.00	2,973,152,700.00	-81.34
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	554,932,600.00	2,973,152,700.00	-81.34

B.5.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39,950,000.00 dan Rp226,915,000.00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -82.39% dibandingkan TA 2018.

Mutasi tambah atas nilai Jaringan senilai Rp39.950.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Penyelesaian Jaringan Listrik Lainnya senilai Rp. 39.950.000

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	39,950,000.00	226,915,000.00	-82.39
Jumlah Belanja Kotor	39,950,000.00	226,915,000.00	-82.39
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	39,950,000.00	226,915,000.00	-82.39

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp. 0.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019
Uang muka dari KPPN	0.00
Jumlah	0.00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 112,602.00 dan Rp0.00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	112,602.00	0.00
Jumlah	112,602.00	0.00

Yang merupakan Penerimaan yang akan di setor pada Januari 2020

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-563.00 dan Rp0.00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp223,881,623.00 dan Rp164,010,126.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	223,881,623.00	164,010,126.00
Jumlah	223,881,623.00	164,010,126.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.3,619,590,850.00 dan Rp.3,145,443,950.00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	3,145,443,950.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	299,000,000.00
Pengembangan Melalui KDP	534,797,900.00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-359,651,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	3,619,590,850.00

Mutasi tambah atas nilai Tanah senilai Rp833.797.900 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), berasal dari:

1. Pembelian tanah kantor induk senilai Rp. 299.000.000.
2. Pengembangan aset dari KDP tanah bangunan kantor pemerintah senilai Rp. 534.797.900

Mutasi kurang atas nilai Tanah senilai Rp359.651.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Hibah tanah bangunan laboratorium ke PUPR senilai Rp. 178.704.000.
2. Hibah tanah bangunan laboratorium ke PUPR senilai Rp. 180.947.000.

Jumlah asset tetap tanah sebesar Rp.3.619.590.850,00 yang sudah di lakukan PSP sebesar Rp. 1.330.469000,00 dan yang belum di lakukan PSP sebesar Rp. 2.289.121.850,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7,247,863,811.00 dan Rp6,237,299,411.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	6,237,299,411.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1,107,066,400.00
Pengembangan Nilai Aset	29,998,000.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-126,500,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	7,247,863,811.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-4,873,255,776.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	2,374,608,035.00

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp1.137.064.400 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah), berasal dari:

1. Pembelian 1 Unit Station Wagon senilai Rp. 258.000.000
2. Pembelian 1 Unit Sepeda Motor senilai Rp. 36.000.000
3. Pembelian 12 Buah Meja Kerja Kayu senilai Rp. 22.500.000
4. Pembelian 46 Buah Kursi Besi/Metal senilai Rp. 61.500.000
5. Pembelian 10 Buah A.C Split senilai Rp. 74.000.000
6. Pembelian 1 Buah Vertical Blind senilai Rp. 47.000.000

7. Pembelian 5 Buah Uninterruptible Power Supplay (UPS) senilai Rp. 13.680.000
8. Pembelian 5 Buah P.C Unit senilai Rp. 75.000.000
9. Pembelian 3 Buah Laptop senilai Rp. 44.700.000
10. Pembelian 8 Buah Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp. 19.790.400
11. Pembelian 1 Buah Server senilai Rp. 50.000.000
12. Pengembangan Nilai Aset 1 Unit Mini Bus senilai Rp. 29.998.000
13. Pembelian 1 Unit Sepeda Motor senilai Rp. 36.000.000
14. Pembelian 6 Unit Sepeda Motor senilai Rp. 216.000.000
15. Pembelian 1 Unit Alat Laboratorium Penunjang Lainnya senilai Rp. 6.200.000
16. Pembelian A.C Split 1 Unit senilai Rp. 5.600.000
17. Pembelian Cold Storage (Alat Pendingin) 2 Unit senilai Rp. 11.200.000
18. Pembelian Micropipette 50-200 Ul 1 Unit senilai Rp. 3.500.000
19. Pembelian A.C Split 5 Unit senilai Rp. 32.500.000
20. Pembelian Vertical Blind 1 Buah senilai Rp. 11.496.000
21. Pembelian Sepeda Motor 2 Unit senilai Rp. 65.200.000
22. Pembelian Sepeda Motor 1 Unit senilai Rp. 17.200.000

Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp126.500.000 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Penghentian Penggunaan BMN berupa 1 Unit Pick Up senilai Rp. 126.500.000.

Darri asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 6.237.299.411,005.270.381.911,00 yang sudah di lakukan PSP sebesar Rp. 5.270.381.911,002. dan yang belum si lakukan PSP sebesar Rp. 002.092.099.400,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9,774,843,025.00 dan Rp9,219,910,425.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	9,219,910,425.00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	554,932,600.00
Saldo per 31 Desember 2019	9,774,843,025.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-427,997,304.00

Nilai Buku per 31 Desember 2019	9,346,845,721.00
--	-------------------------

Mutasi tambah atas nilai Bangunan Gedung senilai Rp554.932.600 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah), berasal dari:

1. Penyelesaian Pembangunan Gedung Pos Jaga Permanen senilai Rp. 25.150.000
2. Penyelesaian Pembangunan Gedung Pos Jaga Permanen senilai Rp. 329.582.600
3. Penyelesaian Pembangunan Selasar senilai Rp. 200.200.000

Dari aset tetap Gedung bangunan sebesar Rp. 9.219.910.425,00, yang sudah di lakukan PSP sebesar Rp. 2.092.099.400, dan yang belum di lakukan PSP sebesar Rp. 7.682.743.625

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp692,147,000.00 dan Rp652,197,000.00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	652,197,000.00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	39,950,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	692,147,000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-17,650,825.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	674,496,175.00

Mutasi tambah atas nilai Jaringan senilai Rp39.950.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Penyelesaian Jaringan Listrik Lainnya senilai Rp. 39.950.000

Dari aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan sebesar Rp. 692.147.000,00 yang sudah di lakukan PSP sebesar Rp. 425.282.000,00 dan yang belum di lakukan PSP sebesar Rp. 266.865.000,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp119,261,900.00 dan Rp119,261,900.00. dan sudah di lakukan PSP.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-5,497,772,551.00 dan Rp-4,609,711,198.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7,247,863,811.00	-4,873,255,776.00	2,374,608,035.00
2.	Gedung dan Bangunan	9,774,843,025.00	-427,997,304.00	9,346,845,721.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	692,147,000.00	-17,650,825.00	674,496,175.00
4.	Aset Tetap Lainnya	119,261,900.00	0.00	119,261,900.00
Akumulasi Penyusutan		17,834,115,736.00	-5,497,772,551.00	12,336,343,185.00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp44,975,000.00 dan Rp44,975,000.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	44,975,000.00
Jumlah	44,975,000.00

Aset tak berwujud sebesar Rp. 44.975.000 terdiri dari:

1. Website sebesar Rp. 15.000.000,-
2. Aplikasi perkantoran sebesar Rp. 29.975.000,-

Dari jumlah asset tetap tak berwujud sebesar Rp. 44.975.000 yang sudah di lakukan PSP sebesar Rp. 15.000.000,00 dan yang belum sebesar Rp. 29.975.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.783,585,000.00 dan Rp657,085,000.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	4.600.000.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	126,500,000.00
Saldo per 31 Desember 2019	131.100.000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-122.733.482.00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	53.341.518.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dan sudah di ajukan proses penghapusan adalah berupa:

1. Kendaraan roda-4 sebesar Rp126.500.000,-
2. Tengki air sebesar Rp. 4.600.000,-

Dari jumlah asset lain-lain yang sudah di lakukan PSP sebesar Rp.131.100.000,00 dan yang belum PSP sebesar Rp.4.600,00.

Sebesar 126.500.000 sudah di ajukan penghapusan dan sudah di lakukan penilaian oleh KPKNL Kalimantan Barat.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-459,658,214.00 dan Rp-349,021,607.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	44,975,000.00	-18,740,625.00	26,234,375.00
2.	Aset Lain-lain	783,585,000.00	-440,917,589.00	342,667,411.00
Akumulasi Penyusutan		828,560,000.00	-459,658,214.00	368,901,786.00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.13.709.800.00 dan Rp.7.495.000,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	13.709.000.00	7.495.000.00
Jumlah	13.709,000.00	7.495.000.00

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16,552,267,483.00 dan Rp15,281,450,007.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp528,645,702.00 dan Rp282,797,958.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	842,200.00	3,229,011.00	-73.92
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	497,353,502.00	279,568,947.00	77.90
Pendapatan Jasa Lainnya	30,450,000.00	0.00	0.00
Jumlah	528,645,702.00	282,797,958.00	86.93

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2,442,386,281.00 dan Rp2,134,445,348.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,287,349,120.00	1,047,532,640.00	22.89
Beban Pembulatan Gaji PNS	27,803.00	20,968.00	32.60
Beban Tunj. Anak PNS	22,556,146.00	21,983,290.00	2.61
Beban Tunj. Beras PNS	74,375,340.00	68,292,060.00	8.91
Beban Tunj. Fungsional PNS	106,620,000.00	133,560,000.00	-20.17
Beban Tunj. PPh PNS	422,600.00	49,200.00	758.94
Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000.00	17,460,000.00	1.03

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	80,935,272.00	74,019,190.00	9.34
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0.00	-475,000.00	-100.00
Beban Tunjangan Umum PNS	42,670,000.00	16,755,000.00	154.67
Beban Uang Lembur	579,626,000.00	568,746,000.00	1.91
Beban Uang Makan PNS	230,164,000.00	186,502,000.00	23.41
Jumlah	2,442,386,281.00	2,134,445,348.00	14.43

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp184,120,047.00 dan Rp206,585,200.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	184,120,047.00	206,585,200.00	-10.87
Jumlah	184,120,047.00	206,585,200.00	-10.87

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,277,731,400.00 dan Rp841,860,961.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0.00	10,050,000.00	-100.00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	328,351,300.00	109,205,100.00	200.67
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	102,480,000.00	102,480,000.00	0.00
Beban Honor Output Kegiatan	23,000,000.00	22,500,000.00	2.22
Beban Jasa Lainnya	57,260,200.00	35,000,000.00	63.60
Beban Keperluan Perkantoran	496,803,100.00	301,340,850.00	64.86
Beban Langganan Air	3,729,000.00	28,342,400.00	-86.84
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0.00	40,408,000.00	-100.00
Beban Langganan Listrik	101,494,900.00	48,419,766.00	109.61
Beban Langganan Telepon	31,036,500.00	26,173,845.00	18.58
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	115,357,000.00	89,541,200.00	28.83
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,909,400.00	3,399,800.00	14.99
Beban Sewa	14,310,000.00	25,000,000.00	-42.76
Jumlah	1,277,731,400.00	841,860,961.00	51.77

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp444,211,800.00 dan Rp271,040,700.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60,599,000.00	14,000,000.00	332.85
Beban Pemeliharaan Jaringan	19,989,000.00	0.00	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	363,623,800.00	257,040,700.00	41.47
Jumlah	444,211,800.00	271,040,700.00	63.89

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1,293,428,440.00 dan Rp864,504,550.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	687,578,889.00	447,813,900.00	53.54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,700,000.00	0.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0.00	8,000,000.00	-100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	546,299,551.00	357,189,700.00	52.94
Beban Perjalanan Tetap	29,850,000.00	51,500,950.00	-42.04
Jumlah	1,293,428,440.00	864,504,550.00	49.62

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp998,697,960.00 dan Rp776,721,159.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	11,243,750.00	7,496,875.00	49.98
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	224,277,355.00	167,431,142.00	33.95
Beban Penyusutan Irigasi	5,220,640.00	5,220,640.00	0.00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	89,886,558.00	78,540,808.00	14.45
Beban Penyusutan Jaringan	2,995,025.00	2,495,650.00	20.01
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	18,071,429.00	13,478,652.00	34.07
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	647,003,203.00	502,057,392.00	28.87
Jumlah	998,697,960.00	776,721,159.00	28.58

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp563.00 dan Rp0.00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	563.00	0.00	0.00
Jumlah	563.00	0.00	0.00

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00	-260,903,974.00	-100.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-321,500.00	0.00	0.00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-3,653,358.00	-1,882,194.00	94.10
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	108,902.00	115,250.00	-5.51
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0.00	2,910,000.00	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	475,000.00	-100.00
Jumlah	-3,865,956.00	-259,285,918.00	-98.51

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian beban yang tersaji pada tabel diatas>.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp15,281,450,007.00 dan Rp12,454,483,654.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-6,115,796,745.00 dan Rp-5,071,645,878.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp-942,633,627.00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp-942,633,627.00.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7,386,614,221.00 dan Rp8,841,245,858.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	8,257,390,821.00
Diterima dari Entitas Lain	-528,533,100.00
Transfer Keluar	-359,651,000.00
Transfer Masuk	17,407,500.00
Jumlah	7,386,614,221.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-528,533,100.00 sedangkan DKEL sebesar Rp8,257,390,821.00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17,407,500.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	17,407,500.00
Jumlah			17,407,500.00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-359,651,000.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Tanah	033041300498634000KP	-359,651,000.00
Jumlah			-359,651,000.00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp16,552,267,483.00 dan Rp15,281,450,007.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Terdapat penambahan sebanyak 12 CPNS yang mempengaruhi penambahan realisasi belanja 51.